

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pembangunan

Pembangunan secara umum pembangunan didefinisikan sebagai peningkatan produk nasional GDP atau GNP yang disebabkan bukan saja oleh peningkatan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi melainkan karena digunakan teknologi baru. Dengan faktor produksi yang sama, karena teknologi bisa menghasilkan output yang lebih besar. Sedangkan menurut (Hudiyanto, 2017) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses terjadinya kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Definisi lainnya menurut (Todaro, 2000) secara tradisional yang dapat diartikan kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi awalnya kurang lebih memiliki sifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP (*Gross National Product*) dengan contoh pertumbuhan 5% hingga 7% atau bisa lebih dari yang ditargetkan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya ada tiga unsur yang harus dalam ekonomi pembangunan, yaitu

- a. Suatu proses yang mana merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus.

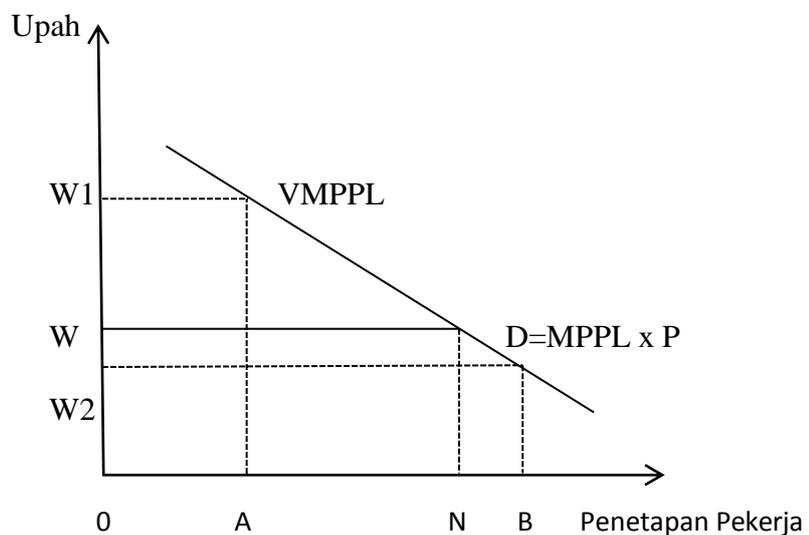
- b. Peningkatan pendapatan per kapita penduduk
- c. Kenaikan pendapatan per kapita penduduk berlangsung terus-menerus dalam jangka Panjang.

Negara maju (*developed country*) artinya adalah negara yang telah mengalami proses perubahan dengan ditandai oleh peningkatan pendapatan per kapita kesejahteraan masyarakat terus-menerus dalam waktu yang Panjang.

Menurut (Basuki & Prawoto, Pengantar Ekonomi Mikro Dan Maksiro, 2015) pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadinya kenaikan produk nasional bruto rill atau pendapatan nasional rill. Dapat dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi output rill. Definisi lainnya pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita atau dapat digambarkan kenaikan suatu taraf hidup diukur dengan output rill per orang. Mengingat konsep pertumbuhan ekonomi juga sebagai tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional seperti itu sudah diyakini secara luas, maka tidak boleh ketinggalan. Sejumlah konsep dan teori yang berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kerangka pemikiran kemungkinan produksi (*production possibility framework*) sebagai dasar guna memahami tingkat, komposisi dan pertumbuhan output nasional.

Ada 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Akumulasi Modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Kemajuan Teknologi
- c. Pertumbuhan Penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.



Gambar 2. 1 Fungsi Permmintaan Terhadap Tenaga Kerja

Sumber: Payaman Simanjuntak, 1985

Pada gambar 2.1 kurva permintaan menjelaskan hubungan antara besarnya tingkat upah terhadap jumlah tenaga kerja. Kurva permintaan memiliki kemiringan (slope) yang negatif, sehingga semakin tinggi upah yang diminta, maka permintaan atas jumlah tenaga kerja akan semakin sedikit, dan kebalikannya semakin rendah tingkat upah, maka permintaan terhadap tenaga kerja akan semakin banyak (Simanjuntak, 1985).

Pendapatan regional merupakan gambaran dari perekonomian suatu daerah, dan akan berguna bagi para ahli yang bergerak di bidang perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik yang berhubungan dengan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, pembelanjaan secara ekonomi oleh pemerintah dan swasta. Selain itu tidak kurang pentingnya bahwa dengan perhitungan pendapatan regional dapat dilihat dari konsistensinya. Dengan tersedianya statistic pendapatan regional secara berkala di daerah dapat diketahui antara lain:

a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Apabila angka-angka statistic pendapatan regional diberikan atas dasar harga konstan, akan menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah, baik itu secara menyeluruh maupun suatu daerah.

b. Tingkat Kemakmuran Suatu Daerah

Pertumbuhan perekonomian yang tinggi belum tentu juga menjamin kemakmuran suatu daerah atau yang baik bagi masyarakatnya oleh karena itu mungkin perkembangan penduduknya juga cukup tinggi. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab bila dipandang dari sudut konsumsi, berarti masyarakat akan memiliki kesempatan dalam menikmati barang dan jasa.

c. Gambaran Struktur Perekonomian

Dari angka-angka yang akan disajikan menurut sector dapat dilihat dari struktur perekonomian disuatu daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya pembangunan tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktifitas yang dilakukan dari aktifitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekan pada peningkatan income per capita (pendapatan per kapita). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Todaro, 2000):

- a. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi suatu kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
- b. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang.
- c. *Freedom from servitude*: kebebasan dalam bagi setiap individu suatu negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah menyebutkan bahwasannya “Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *publik capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang mana dilakukan oleh pemerintah. (Farel, 2015) infrastruktur meliputi undang-undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik; sistem distribusi dan perawatan air; pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan pembuangannya; sistem keselamatan publik, seperti pemadaman listrik; sistem komunikasi, sistem transportasi dan utilitas publik. Dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap fasilitas publik maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dan bisa dikatakan tingkat keberhasilan sangat baik. Namun untuk utilitas daerah tidak akan pernah habis, maka pemerintah daerah harus terus menambah belanja modal untuk memuaskan masyarakat untuk bisa menikmati fasilitas dan infrastruktur publik. Oleh karena belanja modal dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Belanja modal tanah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peraturan, pematangan tanah,

pembuatan ha katas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- b. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan pembangunan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.
- d. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- e. Belanja peralatan dan mesin pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau pengganti, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang

memberikan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 struktur APBD merupakan satu kesatuannya yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan (UU No. 30 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Dengan diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berguna untuk menyempurnakan

sistem desentralisasi fiskal. Penyerahan wewenang pengelolaan jenis-jenis pajak yang mana bisa dipungut pemerintah daerah sesuai dengan potensinya diharapkan dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut (Hartiningsih & Eryanus Herman, 2015) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya. Tingginya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah akan bantuan dana dari Pemerintah Pusat semakin dekat.

Dalam penyelenggaraan kegiatan layanan publik dan pembangunan daerah tingkat II, pendapatan asli daerah memang cukup penting dimana pendapatan asli daerah tingkat II secara bertahap dapat terus ditingkatkan sehingga semakin mampu membiayai kebutuhannya sendiri, terlebih dalam situasi dan bantuan kepada daerah. Namun demikian dalam rangka menggali dan pendapatan asli daerah pemerintah daerah harus tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari pungutan-pungutan yang sifatnya memberatkan rakyat kecil.

Realisasi PAD antar kota atau kabupaten setiap tahunnya dapat bervariasi, karena potensi setiap pos penerimaannya juga mengalami

perkembangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatannya yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 untuk kepentingan biaya di daerah dan bagi kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran imbalan atas manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seorang atau badan jasa yang nyata dari pemerintah daerah. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

c. Hasil pengelolaan, kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dimana pemerintah bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini meliputi bagian perusahaan milik daerah, bagian laba Lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.

d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lainnya pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang sah diluar dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba dari BUMN.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambahan pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran (Riau Dalam Angka, 2018).

Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Di dalam suatu perekonomian, di negara-negara maju maupun di negara berkembang, barang dan jasa diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain. Selalu didapatkan produksi nasional yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar Indonesia.

PDRB dapat diperoleh dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran yang akan dielaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan ini pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah tersebut kemudian dikurangkan dengan biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara produksi dan nilai biaya.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa yang diterima dari faktor produksi yaitu upah, gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung, dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung. Surplus usaha diantaranya meliputi, bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah dan keuntungan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai pengeluaran akhir dari barang dan jasa yang diproduksi didalam negeri. Apabila dilihat dari pengeluarannya maka total produksi barang dan jasa dapat digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, ekspor neto.

Dalam penyajian PDRB dapat dilihat dalam dua bentuk menurut Badan Statistik Nasional, yaitu:

- a. PDRB atas harga dasar berlaku, menjelaskan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga setiap tahun. Serta dapat melihat pergeseran dan struktur suatu perekonomian.
 - b. PDRB atas harga kosntan, menjelaskan tentang nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasarnya. Gunanya untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi rill dari tahun ke tahun.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

SiLPA menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggara selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggara sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akun terbentukbila terjadi surplus pada ABPD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah selisih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SIKPA, SiLPA/SIKPA diperoleh dari penutupan akun surplus/deficit dan pembiayaan Neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

6. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan populasi atas sumber daya manusia yang mendiami atau menduduki suatu wilayah tertentu. Penduduk dewasa merupakan subjek pembangunan, meningkatkan jumlah penduduk menuntut konskuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum di suatu daerah, baik aspek kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan pasal 28 UU Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

Pengelompokkan data kependudukan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri yang dinamakan komposisi, oleh karena itu komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan karakteristik

yang sama, misalnya komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan

Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang paling pokok, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling sering digunakan dalam berbagai bidang.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling sering digunakan dalam berbagai bidang. Komposisi penduduk menurut umur dikenal dengan istilah struktur penduduk, biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Setiap kelompok umur pada umumnya memiliki jarak antara 5 tahun, misalnya 0-4, 5-9, 10-14,.....60-64, 65+. Struktur penduduk tidak sama antara negara yang satu dan negara yang lain, antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta antara pulau yang satu sama yang lainnya. Struktur penduduk ini dipengaruhi oleh tiga faktor demografis, yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk).

Berdasarkan pengelompokan tersebut, struktur penduduk dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Umur 0-14 tahun dinamakan usia muda (usia belum produktif). Jika suatu wilayah atau negara sebagian besar penduduknya berusia muda, wilayah atau negara tersebut termasuk dalam struktur penduduk muda.
- b. Umur 15-64 tahun dinamakan usia dewasa (usia produktif atau usia kerja). Jika suatu wilayah atau negara sebagian besar penduduknya

berusia tua, wilayah atau negara tersebut termasuk dalam struktur penduduk dewasa.

- c. Umur 65 tahun atau lebih dinamakan usia tua (usia tidak produktif).

Jika suatu wilayah atau negara sebagian besar penduduknya berusia tua, wilayah atau negara tersebut termasuk dalam struktur penduduk tua.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Belanja

Modal

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambahan pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran (Riau Dalam Angka, 2018).

Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Di dalam suatu perekonomian, di negara-negara maju maupun di negara berkembang, barang dan jasa diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain. Selalu didapatkan produksi nasional yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar Indonesia.

(Farel, 2015) menyatakan bahwasannya secara parsial PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa PDRB yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar. PDRB yang tinggi menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah dalam mengambil pembangunan dalam hal infrastruktur. Sehingga semakin meningkatnya PDRB permintaan para pelaku ekonomi kepada pemerintah akan infrastruktur dan pelayanan publik semakin meningkat.

2. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Kebijakan desentralisasi yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan suatu daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah untuk merealisasikan potensi ekonomi sehingga dapat menjadikan kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penganggaran belanja-belanja yang akan dilakukan setidaknya bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau. Ketika pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara yang baik maka perekonomian dapat meningkat. Tugas utama dari pemerintah daerah

adalah untuk melakukan pelayanan publik, ketika pelayanan publik dilakukan secara baik maka kepercayaan publik akan meningkat terhadap pengelolaan uang di masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketika kepercayaan publik meningkat dapat dipastikan PAD juga akan meningkat. Otonomi daerah akan menuntut aparatur pemerintah yang berkemampuan, sehingga masyarakat secara nyata memperoleh manfaat dari adanya otonomi itu. Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik.

(Hartiningsih & Eryanus Herman, 2015) menyimpulkan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi 3 yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lainnya pendapatan asli daerah. Dimana pajak daerah dan lain-lainnya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Riau sehingga semakin tingginya retribusi daerah belum tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal.

3. Hubungan antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dengan Belanja Modal

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 tahun 2011 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selanjutnya, menurut

pasal 62 bahwa SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselasaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 137 yaitu merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk a) dapat menutupi defisit anggaran ketika realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Sebenarnya didalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah mengatur secara jelas tentang SiLPA, diantaranya SiLPA merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan dan penggunaannya jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan SiLPA sering dipergunakan untuk pendapatan negara. Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, SiLPA hanya boleh dipergunakan bila deficit APBN dan APBD mencapai 3 persen.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa SiLPA adalah suatu indicator yang menggambarkan efisiensi atas pengelolaan anggaran

pemerintah. Anny Ratnawati (2013) menyatakan bahwa tingginya angka SiLPA menunjukkan bahwa Pemda belum secara cermat mengelola keuangannya. Oleh karena itu, pemda tidak lagi diberikan SiLPA kecuali apabila ada dana sisa untuk efisiensi program, bukan karena programnya mangkrak atau macet.

Salah satu penggunaan SiLPA Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 137 adalah mendai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dalam hal itu mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai. Khusus terkait kolerasi antara SiLPA dan belanja modal, beberapa penelitian telah dilakukan (Siswanto & D. Kusnandar, 2012) yang meneliti 295 SKPD tahun 2010 mendapatkan bukti empiris bahwa SiLPA mempunyai signifikansi positif dengan alokasi belanja modal.

4. Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Belanja Modal

Belanja modal yang dilakukan oleh daerah pada dasarnya merupakan untuk kepentingan pelayanan publik, baik berupa sarana dan prasarana yang akan menunjang efektif dan efisiennya pelayanan tersebut. Penduduk yang semakin banyak akan membutuhkan pelayanan yang semakin banyak pula dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih kecil.

C. Penelitian Terdahulu

(Prakosa, 2004) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)”. Penelitian ini menggunakan data panel pada 40 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY dengan menggunakan alat analisis statistic yang digunakan adalah simple regression dan multiple regression. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, dengan variabel bebas adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Objek penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah dan DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DAU dan PAD berpengaruh positif atau signifikan terhadap belanja modal di Jawa Tengah dan DIY.

(Nugroho, 2017) dengan penelitian “Analisis Data Panel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indoneia” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengalisis faktor-faktor yang memepngaruhi belanja modal di seluruh Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi anggaran kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun dari 2010 hingga 2014. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini dana alokasi umum tidak memberikan signifikan di seluruh Indonesia. Dari hasil regres yang telah dilakukan terdapat DAU dapat dilihat dari p-value bahwa dengan tingkat signifikan 95% ($\alpha = 5\%$) DAU memiliki p-value sebesar 0.3431.

(Sugiyanta, 2016) dengan penelitian “Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja modal kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan model data panel. Model penelitian ini menggunakan enam variabel independent yaitu Kemandirian Daerah (Mandiri), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Belanja Pegawai (BPegawai), serta Belanja Modal (BM) adalah data dependennya. Hasil penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negative terhadap belanja modal, yang mana DAU pada Belanja Modal menunjukkan hasil signifikan dengan arah berlawanan dikarenakan DAU bersifat “Block Grant” yang artinya keleluasaannya pengguna diberikan kepada kepala daerah yang disesuaikan dengan prioritas serta kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Menurut (Wahyudin & Yuliadi, 2013) dengan penelitian “Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewah Yogyakarta, Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di Daerah Yogyakarta pada tahun 2006-2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan alat analisis menggunakan analisis regresi data panel yaitu model *random effect*. Model penelitian ini menggunakan empat variabel independent yaitu

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Belanja Modal (BM), dan Tenaga Kerja (TK) serta Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) sebagai variabel dependent. Hasil dari penelitian adalah pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai koefisien sebesar 0.102865 dengan signifikansi 0.0062 yang artinya Belanja Modal >0.005 maka Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewah Yogyakarta tahun 2006-2015. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY memiliki hubungan yang positif.

(Farel, 2015) dengan penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor” dengan tujuan penelitian untuk meneliti pengaruh antara variabel terikat dan beberapa variabel bebas dan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data runtut waktu (*time series*), semua data dalam kuartalan dimulai dari tahun 2003-2013. Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *Ordinary Least square* (OLS) sebagai estimasi koefisien regresinya. Pengolahan data menggunakan Excel 2007 dan Eviews 6. Variabel PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal kabupaten Bogor, dengan hasil probabilitas t-statistik sebesar 0.0083. karena probabilitas t-statistik lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Koefisien PDRB sebesar 0,001418 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDRB 1% akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,1418% dengan asumsi *ceteris paribus*.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten Bogor, dengan hasil probabilitas t-statistik sebesar 0,0002 lebih kecil dari 0,05 berpengaruh signifikan. Koefisien PAD sebesar 0,329324 bahwa setiap kenaikan PAD 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 32,9324%. Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Bogor, dengan hasil probabilitas t-statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Koefisien SiLPA sebesar 0,440522 menunjukkan bahwa setiap kenaikan SiLPA 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 44,0522% dengan asumsi *ceteris paribus*.

(Hapsari & Iskandar, 2018) dengan penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014” penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode panel, yaitu menggabungkan *time series* dimulai dari tahun 2010 sampai 2014 dan *cross section* menggunakan 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel dependen pertumbuhan ekonomi diproksikan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi positif dan signifikan dimana nilai elastisitas sebesar 0,0609 berarti setiap kenaikan belanja modal 1% akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%.

(Arini, 2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau

Kalimantan” dengan tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan data sekunder dan memperoleh data dari Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dan menggunakan sample data 4 provinsi di Pulau Kalimantan. Dalam penelitian ini juga bahwasannya Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi hal tersebut terlihat dari nilai koefisien jalur yang menunjukkan angka negative yaitu sebesar -0,15 namun nilai p-value yang diperoleh adalah sebesar $<0,01$ yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditentukan.

Menurut (Triyanto, Wahyudi, & Ananda, 2017) dengan judul penelitian “*The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue: Study In East Java Indonesia*” Sampelnya adalah 29 kabupaten dan 9 kota, sehingga total menjadi 38 Kabupaten/Kota selama periode studi 5 tahun pada 2009-2013. menunjukkan bahwa pengeluaran modal secara signifikan dan positif mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang berarti bahwa semakin besar pengeluaran modal akan meningkatkan PDRB. Pengaruh belanja modal pada PDRB adalah 0,849. Ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah di Kabupaten / Kota di Jawa Timur ditentukan berdasarkan prinsip efisiensi alokatif dalam teori federalisme fiskal sehingga dapat secara efektif meningkatkan PDRB.

(Raja, 2015) dengan judul penelitian “*Influence Product Domestic Regional Bruto (PDRB), Total Population, And Capital Expenditures On Pad*

(Regional Generated Revenue) (A Case Study In District And Towns In North Sumatera Province)” bertujuan untuk melihat hubungan hubungan antara dua atau lebih variabel dengan model replikasi dari penelitian sebelumnya untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terkait dengan Realisasi data APBD, Realisasi PDB Harga konstan dan Realisasi Penduduk yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2010-2015. Nilai koefisien regresi PDRB adalah 0,542, yang positif. Nilai PDRB bisa diartikan memiliki efek positif pada PAD. Mengingat nilai Sig $0,000 < 0,05$ dan nilai t 8,006 ada di area H_1 , jadi PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nilai koefisien regresi belanja modal adalah 0,527, yang positif. Itu nilai dapat diartikan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Mengingat nilai Sig $0,000 < 0,05$ dan nilai t 5,611 berada di area H_1 , maka belanja modal memiliki efek signifikan terhadap PAD.

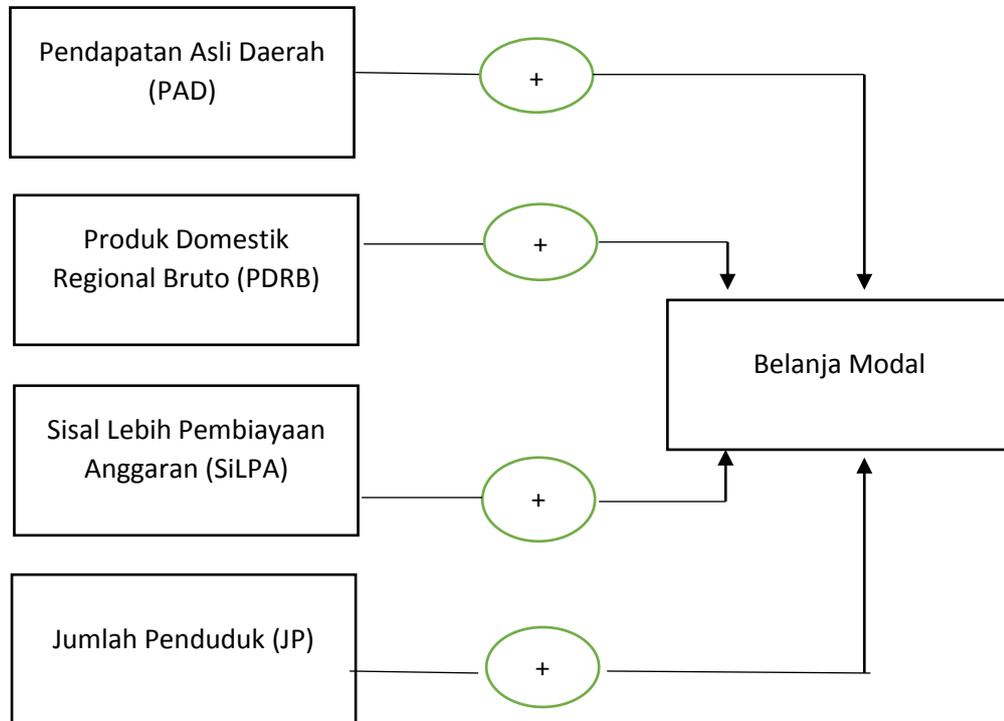
Menurut (Nurlis, 2016) dengan judul penelitian *“The Faktors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia”* penelitian ini bertujuan menentukan efek dari satu atau lebih independent variabel, yaitu Kepadatan Penduduk, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan per Kapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel dependennya adalah Alokasi Belanja Modal dan penelitian ini mencakup 33 provinsi di seluruh Indonesia pada periode 2011-2013. Koefisien regresi variabel DAU sebesar 0,003 berarti bahwa jika nilai variabel independen lainnya adalah tetap dan DAU meningkat menjadi

Rp. 1 maka belanja modal akan meningkat sebesar Rp. 0,003. Koefisien itu positif berarti ada hubungan positif antara DAU dan belanja modal, peningkatan DAU, semakin tinggi nilai belanja modal yang dianggarkan. Koefisien regresi variabel PAD sebesar 0,295 berarti bahwa jika nilai variabel independen lain adalah tetap dan pendapatan meningkat menjadi Rp. 1, maka belanja modal akan berkurang sebesar Rp. 0,295. Koefisiennya adalah negatif berarti pergi hubungan negatif antara PAD dengan belanja modal, peningkatan pendapatan tidak tentu saja belanja modal semakin tinggi. Koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi, yang diukur dengan PDB sebesar 0,517 berarti jika nilai variabel independen lainnya adalah tetap dan PDB meningkat Rp. 1 - maka pengeluaran modal akan meningkat sebesar Rp. 0,517. Koefisiennya positif, artinya ada hubungan positif antara ekonomi pertumbuhan dan pengeluaran modal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pengeluaran modal yang dianggarkan.

D. Kerangka Pikiran

Agar kegiatan penelitian ini dapat memudahkan peneliti, maka dibuat akar penelitian untuk memperjelas penelitian ini dan mengetahui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk.

Secara skema dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Teoritis

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang masih bersifat sementara atas permasalahan dalam penelitian yang memerlukan pembuktian secara empiris lebih lanjut. Berdasarkan beberapa kajian empiris yang telah dilakukan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 : Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2. H_0 : Diduga variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
3. H_0 : Diduga variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
4. H_0 : Diduga variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.